

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (public policy) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan (Winarno, 2007: 16). Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1975, dalam Syafiie (2006: 105) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (whatever government choose to do or not to do)”.

Dye dalam Harbani Pasolong (2008) mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakantindakan untuk masyarakat.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kamus Webster, merumuskan bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carryingout (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practicia effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Pengertian implemntasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan adalah hal yang paling- berat, karena disini masalahmasalah yang kadang tidak dijumpai didalam konep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat beberapa teori implementasi kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Budi Winarno (2002), yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa, yaitu, *“Implementasi adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pandangan kedua ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan social yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2002;102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompokkelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Micahel Howlet dan M. Ramesh (1995;11) dalam buku Subarsono (2006;13), bahwa: "Implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan kebijakan supaya mencapai hasil."

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi

kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Meter dan Horn (Subarsono;2006;99) mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;

- 1) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur,
- 2) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- 3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

2.3 Tingginya Tingkat Kejahatan

Berbicara tentang tentang kejahatan kita harus terlebih dahulu melihat dari sudut mana kejahatan itu ditinjau. Secara umum pada dasarnya kejahatan pengertian kejahatan ini diberikan pada suatu jenis atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Oleh karena perbuatan jahat bertolak ukur pada alam nilai, tentunya penafsiran yang diberikan pada perbuatan atau tingkah laku itu sangat relatif sekali. Kerelatifannya terletak pada penilaian yang diberikan oleh masyarakat dimana perbuatan tersebut terwujud. Karena nilai-nilai yang diberikan kepada kebudayaan masyarakat sangat bervariasi maka

pengertian, sifat, maupun jenis kejahatan sangat tergantung kepada penilaian dan jenis reaksi yang diberikan oleh masyarakat dimana perbuatan itu terjadi.

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya over kapasitas di LP adalah meningkatnya tindak kejahatan, jumlah perkara yang disidangkan lebih kurang 5.000 perkara setiap tahun, dimana tindak pidana yang paling banyak terjadi adalah penyalahgunaan narkoba akibat pengaruh lingkungan dan kecemasan akan hidup, tindak pidana asusila karena pengaruh lingkungan misalnya menonton film porno, dan pencurian karena kesulitan ekonomi.

2.4 Efektivitas

Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. Senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hal yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Istilah efektif (effective) dan efisien (efficient) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (1989) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan"(Effendy, 1989:14). Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengertian lain menurut Susanto, “Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Susanto, 1975:156). Menurut pengertian Susanto diatas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Menurut pendapat Mahmudi (2005:92) dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 mengenai hubungan arti efektivitas di bawah ini.

Gambar 2.1

Hubungan Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{OUTCOME}}{\text{OUTPUT}}$$

Sumber: Mahmudi, 2005:92

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menurut Moenir (2006:166) efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai targettargetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

Robbins dalam Tika P. (2008:129) memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya adalah efektivitas merupakan suatu standar pengukuran 10 untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Goodman and Penning dalam buku Azhar Kasim (1993:8) bahwa construct efektivitas merupakan tema pokok dalam sebagian besar penelitian yang memakai organisasi secara keseluruhan sebagai unit analisis. Hall (1982) juga juga mengobservasi bahwa efektivitas merupakan titik tolak yang dominan baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun secara implisit oleh para sarjana maupun praktisi dalam melakukan analisis organisasi.

Menurut Siagian yang dikutip oleh Adam Ibrahim Indrawijaya (2010:175) memberikan pengertian tentang efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu penyelesaian tepat waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah suatu pelaksanaan dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Menurut Steers dalam buku Edy Sutrisno (2010:123) pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung

mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia.

Menurut Makmur (2011:5), dijelaskan bahwa persepsi tentang efektivitas sesungguhnya bersumber dari salah satu kriteria ilmu administrasi yang berkembang secara alamiah ke dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang mereka kehendaki. Memang secara alamiah dalam realitas bahwa apa yang kita bayangkan sebelumnya itu mungkin dapat terjadi, tetapi mungkin juga tidak, namun kalau memang kita telah mengetahui secara pasti akan terjadi sesuatu itu. Seringkali diucapkan bahwa pengujian yang sebenarnya untuk manajemen yang baik ialah kemampuan mengorganisir dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam tugas untuk mencapai dan memelihara suatu tingkat operasi yang efektif.

Menurut Steers (1984:207) berpendapat bahwa ada tiga indikator dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

1. Optimisasi Tujuan. Penggunaan rancangan optimisasi tujuan terhadap efektivitas organisasi memungkinkan diakuinya secara eksplisit bahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda pula;
2. Perspektif Sistem. Aspek kedua dari ancangan multidimensi pada analisis efektivitas organisasi adalah penggunaan teori sistem terbuka. Seperti dikemukakan oleh Etzioni (1975), Gopoulos dan Tannenbaum (1957), serta lain-lainnya, penggunaan perspektif sistem menekankan pentingnya arti interaksi organisasi lingkungan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Tekanan pada Perilaku. Aspek terakhir dari rancangan yang disarankan disini adalah tekanan pada pengertian mengenai peranan perilaku manusia dengan pengaruhnya pada prestasi organisasi.

Selain indikator tersebut, indikator lain diungkapkan oleh Makmur (2011:7) sebagai berikut:

1. Ketepatan penentuan waktu. Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Ketepatan perhitungan biaya. Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat pada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada negara yang bersangkutan. Ketetapan dalam pemanfaatan biaya terhadap sesuatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Ketetapan dalam menetapkan suatu satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.
3. Ketepatan dalam pengukuran. Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektivan. Hampir semua kegiatan dimana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan ketetapan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan

sebelumnya merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan. Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur dan kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.
5. Ketepatan berpikir. Ketetapan berpikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah. Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan kepada bawahan tidak dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya serta merugikan organisasi yang bersangkutan.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan. Ketetapan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang telah ditetapkan dengan tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

8. Ketepatan sasaran. Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Berdasarkan uraian indikator efektivitas oleh Makmur di atas, intinya dapat dilihat bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran ukuran ketetapan efektivitas dimana suatu target/sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2.5 Efektivitas Dalam Kebijakan

Berikut adalah efektifitas dalam kebijakan menurut Makmur (2011:16):

1.5.1 Keluruhan kebijakan

Keluruhan kebijakan (policy nobleness) merupakan dambaan semua orang baik itu sebagai individu maupun sebagai anggota organisasi karena dengan keluruhan kebijakan akan menyenangkan semua pihak. Oleh sebab itu, bagaimana menciptakan keluruhan sebagai suatu bentuk kebijakan itu, tentulah sangat tergantung kepada siapa yang membuat kebijakan itu sendiri, apakah memiliki keahlian pribadi sehingga kebijakan tersebut dinilai semua orang terdapat keluruhan di dalamnya terbukti dalam kehidupan masyarakat memiliki mental model yang kuat sehingga tetap dalam pendiriannya dan tidak mudah dipengaruhi oleh dari kalangan siapapun dalam menetapkan kebijakan sehingga semua orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasakan kesenangan dan ketentraman dengan adanya kebijakan tersebut, memiliki kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan atau dicapai terhadap penetapan suatu kebijakan sehingga dapat mencegah rasa keragu-raguan dan dapat menciptakan kepercayaan bagi masyarakat, dan memiliki pemikiran dan tindakan dengan penuh disiplin dan konsisten terhadap apa yang telah ditetapkan dalam suatu bentuk kebijakan.

Keluruhan adalah suatu bentuk keikhlasan dalam berpikir dan bertindak terhadap seluruh aspek kehidupan manusia sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, tetapi semua merasa diuntungkan atau dengan kata lain menyenangkan semua pihak. Berikut merupakan keluruhan yang berkaitan dengan kebijakan menurut Makmur (2011:17) yakni:

- a. Keluruhan berpikir. Kebijakan merupakan hasil dari pemikiran, oleh karena itu dalam proses melahirkan suatu bentuk kebijakan senantiasa dibutuhkan pemikiran yang luhur dengan jalan mempertimbangkan sumbangan-sumbangan pikiran dari berbagai pihak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu bentuk kebijakan, dengan mempertimbangkan seluruh sumber pemikiran adalah suatu tindakan keluruhan
- b. Keluruhan bertindak. Dengan adanya keluruhan bertindak dari semua aspek kehidupan manusia berarti kebijakan yang akan ditetapkan itu akan menjalin suatu rasa keadilan dan manfaat yang di peroleh memberikan kepuasan bagi semua penggunanya.
- c. Keluruhan bergaul. Keluruhan dalam pergaulan sangat menunjang untuk memperoleh informasi yang benar, baik yang diperoleh secara formal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun yang diperoleh secara informal. Keluruhan pergaulan adalah adanya perasaan untuk saling memahami antara satu dengan lainnya kemudian diwujudkan dalam pergaulan.

- d. Keluruhan berperilaku. Gambaran perilaku manusia berbeda antara manusia satu dengan manusia lainnya. Oleh sebab itu dalam menetapkan suatu kebijakan senantiasa mempertimbangkan dan memahami perilaku orang lain agar senantiasa terjadi kesamaan pandangan atau penafsiran dalam rangka mengimplementasikan suatu jenis kebijakan.
- e. Keluruhan memimpin. Keluruhan seorang pemimpin semakin dibutuhkan dalam proses penyusunan suatu jenis kebijakan baik itu kebijakan di lingkungan publik maupun kebijakan di lingkungan privat sehingga memperoleh kebijakanyang dapat menyenangkan atau menguntungkan oleh semua pihak. Keluruhan kebijakan apabila dapat menyenangkan atau menguntungkan semua pihak.
- f. Keluruhan dipimpin. Dengan adanya keluruhan bawahan atau orang yang dipimpin memberikan informasi yang benar dan jujur sangat bermanfaat dalam penetapan suatu kebijakan.
- g. Keluruhan berkomunikasi. Adanya keluruhan berkomunikasi untuk memperoleh keterangan atau informasi yang baik dan benar merupakan harapan utama bagi seseorang yang diberikan kewenangan untuk menetapkan suatu jenis kebijakan.

2.5.2 Etika dan estetika dalam kebijakan

Dinamika telah menjadi suatu asumsi bahwa masalah etika dan estetika dalam kehidupan manusia memungkinkan dapat dikatakan dengan menggambarkan perbedaan-perbedaan antara pemikiran dengan tindakan tentunya termasuk akibat yang ditimbulkannya, sehingga tidak terjadi kesepahaman antara proses pemikiran dari manusia yang satu dengan proses pemikiran manusia yang lainnya.

Etika merupakan bagian yang efektif dan paling ampuh untuk mengontrol sikap kita baik terhadap sesama manusia, maupun terhadap alam disekitar kita karena sikap memang berfungsi sebagai penuntun untuk menunjukkan seberapa efektifnya perjalanan hidup seseorang itu, apakah semakin bahagia, sejahtera dan puas.

Etika kebijakan adalah suatu proses bertindak maupun berpikir yang tidak bertentangan ketentuan atau nilai-nilai yang dianut pada komunitas masyarakat tertentu, sehingga dapat diterima oleh semua pihak untuk ditaati dan dilaksanakan serta diharapkan memberikan hasil bagi kesejahteraan masyarakatan yang bersangkutan. Sasaran etika kebijakan seharusnya mampu melahirkan kreativitas, yaitu menciptakan peningkatan kinerja yang didasari oleh profesionalisme yang tinggi. Kemudian juga harus mampu melahirkan konformitas yaitu peningkatan kinerja yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku pada komunitas masyarakat tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Estetika kebijakan adalah implementasi yang sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat terhadap etika kebijakan sehingga menciptakan normalisasi dalam kehidupan masyarakat. Penerapan etika kebijakan yang meresahkan masyarakat karena disebabkan oleh perilaku bagi [elaku kebijakan, hal ini artinya tidak memahammi estetika yang berlaku dalam masyarakatan yang bersangkutan.

Pada kenyataannya bahwa etika yang berestetika merupakan suatu potensi kebijakan untuk menciptakan kepuasan dan saling menghormati antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Endapan pengaruh etika yang berestetika dalam kebijakan akan berlangsung terus-menerus tanpa akhir dan senantiasa mengikuti kehendak masyarakat terutama bagi manusia yang memiliki membuat atau mengambil kebijakan. Namun demikian bahwa ada substansi etika yang berestetika dalam kebijakan mengalami kehancuran karena disebabkan realitas erosi yang sangat dahsyat serta dapat menghilangkan endapan etika yang berestetika, tujuannya memanfaatkan kebijakan dalam rangka memperoleh tuntutan kebutuhan kehidupan mereka walaupun menyengsarakan orang lain.

2.5.3 Moralitas dalam kebijakan

Moralitas kebijakan bukanlah suatu yang kekal dan berlaku secara permanen, tetapi senantiasa mengalami fluktuasi perubahan dengan mengikuti perkembangan keinginan suatu komunitas masyarakat dalam bangsa yang bersangkutan. Kontemplasi kebijakan yang didasari oleh sikap moralitas adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu yang sangat menentukan apakah kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat untuk menciptakan keteraturan manusia dalam melakukan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Pembentukan moralitas kebijakan haruslah melalui proses pengujian untuk mengukur kebenaran maksud ungkapan atau perbuatan-perbuatan manusia, sehingga kita dapat menemukan kebaikan dan keburukan maksud ungkapan atau perbuatan tersebut.

2.5.4 Tujuan dan sasaran kebijakan

Tujuan dan sasaran kebijakan adalah sesuatu yang ingin dicapai baik yang ingin dituangkan dalam argumentasi secara abstrak maupun yang dituangkan dalam argumentasi konkret sebagai pedoman merealisasi yang ingin dicapai tersebut. Untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan biasanya tidak gampang dijangkau secara empiris karena banyak rintangan yang harus dilalui dalam rangka mencapainya, terutama yang berkaitan dengan tuntutan kebutuhan manusia dimana kita sadari bahwa sangat beraneka ragam jenis danuntutannya.

2.6 Hak-Hak Narapidana

Mengenai Hak-Hak dari Narapidana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat

(1) UU Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa narapidana berhak :

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) Menyampaikan keluhan;

- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.7 Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan (Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat). Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pembinaan narapidana salah satu perwujudannya berupa proses “Pembebasan bersyarat”, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat (pembebasan narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya.

Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, berada sepenuhnya di tengah-tengah keluarga dan masyarakat dengan maksud memberikan kesempatan kepada narapidana untuk belajar bergaul dengan keluarga dan masyarakat yang selama mereka berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) terputus, agar kelak setelah menjalani pidananya mereka dapat hidup wajar di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Proses pembinaan melalui pemberian Pembebasan Bersyarat kepada narapidana pelaksanaannya tidaklah mudah, karena dibutuhkan persiapan, kemampuan dan kerja keras dari petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pada dasarnya setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah melakukan sebuah perbuatan pidana. Oleh karena itu selama menjalani masa pidananya, seorang Narapidana tetap mempunyai hak, yaitu seperti yang terdapat dalam pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, antara lain :

1. *Mendapatkan pengurangan masa pidana (Remisi)*

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.

2. *Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan.

3. *Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB)*

Cuti Menjelang bebas atau CMB adalah proses pembinaan diluar Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek.

Adanya Pembebasan Bersyarat memiliki dampak positif yang dirasakan bagi Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan. Kendala pada saat pelaksanaan Pembebasan Bersyarat adalah ketika melengkapi syarat administratif dan substantif.

Pembebasan Bersyarat, narapidana harus memenuhi syarat substantif dan syarat administratif. Syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01. PK. 04.10 Tahun 2007, persyaratan tersebut antara lain adalah:

a. Syarat Substantif yaitu:

- 1) Narapidana telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- 2) Narapidana telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
- 3) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- 4) Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 5) Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir;
- 6) Masa pidana yang telah dijalani adalah $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidananya itu tidak kurang 9 bulan.
- b. Syarat Administratif yaitu:
 - 1) Salinan surat Keputusan Pengadilan (ekstrak vonis);
 - 2) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan;
 - 3) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan;
 - 4) Salinan register (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Kepala Rumah Tahanan;
 - 5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
 - 6) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau Kepala Desa;

- 7) Bagi narapidana atau anak pidana Warga Negara Asing (WNA) diperlukan syarat tambahan berupa surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan dan surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Dari berbagai persyaratan, banyak diantara narapidana ada yang tidak melengkapi syarat administratif. Jika berkas tidak benar-benar lengkap, proses pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat akan tertunda. Dengan tertundanya pelaksanaan Pembebasan Bersyarat tersebut berdampak pada kondisi lapas yang sesak yang seharusnya dapat berkurang dengan adanya pelaksanaan Pembebasan Bersyarat ini. Padahal kalau saja semua narapidana melaksanakan dan melengkapi persyaratan substantif dan administratifnya, maka proses akan langsung berjalan dan mereka akan cepat merasakan kembali berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah.

Apabila nantinya dalam pelaksanaan bebas bersyarat terdapat Narapidana ternyata hidup secara tidak teratur, bermalas-malasan berkerja, bergaul dengan residivis, mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan dan melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat maka pembebasan yang di berikan dicabut kembali.

2.8 Menurut Pandangan Islam

Pembebasan Bersyarat merupakan pelaksanaan pidana penjara untuk dilepas menjelang bagian akhir masa pidananya, agar menjalani sisa pidana di luar

Lembaga Pemasyarakatan. Secara umum, pembebasan bersyarat memberikan hak kepada seorang narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk menjalani masa hukuman di luar tembok penjara.

Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk memberikan kesempatan memperbaiki diri. Dalam penetapan 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan, tak semua narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat kecuali yang telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang pernah dilakukan, serta mengikuti kegiatan pembinaan secara tekun, dan selama menjalankan pidananya tidak melanggar hukum disiplin. Dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mendapatkan haknya hanya pidana penjara bukan kurungan.

Hukuman penjara menurut para ulama dibagi menjadi dua yaitu penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya. Hukuman penjara yang dibatasi waktunya adalah hukuman penjara yang dibatasi lama hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksanakan terhukum. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan dua bulan atau tiga bulan. Disamping itu, ada yang mengatakan paling lama satu tahun dinisbatkan kepada hukuman buang pada pembuat zina yang lamanya satu tahun. Diantara mereka juga mengatakan bahwa lamanya hukuman itu terserah penguasa sebab hukuman ta'zir adalah hak penguasa. Namun dalam hukuman kawalan batas terendah adalah satu hari, sedang batas tertinggi tidak menjadi kesepakatan para ulama. Sedangkan hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya bisa berupa penjara seumur hidup, hukuman seumur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup adalah hukuman penjara untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berbahaya, seperti pembunuhan yang terlepas dari sanksi qisas karena ada hal-hal yang meragukan dan lain-lain. Selain itu juga hukuman penjara bisa dibatasi sampai terhukum bertaubat.

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat sesungguhnya mengandung unsur pendidikan, sesuai dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan yang menerapkan adanya hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Dengan adanya pembebasan bersyarat narapidana terbukti ada tanda-tanda untuk bertaubat. Seseorang dikatakan taubat bila dalam perilaku telah menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam dirinya.

Pembinaan narapidana adalah suatu pembinaan dalam bentuk penyampaian materi dan kegiatan-kegiatan yang positif untuk melakukan perubahan dalam diri narapidana ke arah yang lebih baik, dalam perubahan berfikir, bertindak, dan dalam bertingkah laku.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pembinaan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat harus ditimbulkan dari diri narapidana itu sendiri. Narapidana sendiri yang harus mau melakukan proses pembinaan bagi dirinya. Pembinaan tersebut dimaksudkan agar narapidana menyadari atas apa yang pernah dilakukan dan bertanggung jawab. Serta peran keluarga, masyarakat, dan petugas dalam pembinaan dan bimbingan. Selain itu, narapidana juga diberikan pembinaan dalam segi keterampilan, kesenian, dan pembinaan dalam segi hukum dan lain-lain yang bernilai positif. Dengan proses tersebut pemberian pembebasan bersyarat akan sesuai dengan apa yang akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijalankan nanti yakni memberikan kesempatan terhadap narapidana untuk mempersiapkan diri terjun ke masyarakat. Dengan adanya proses pembinaan tersebut dalam hukum Islam disebut hukuman ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Hal ini dapat diperkuat pula dengan kenyataan dalam menjatuhkan hukuman kepada narapidana tersebut tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi lebih jauh dari pada itu adalah tujuan pemasyarakatan itu adalah pendidikan dan pengajaran agar setelah mengalami masa pidana yang bersangkutan dapat kembali ke masyarakat serta menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi.

Firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 39

رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ إِنَّ عَٰلِيهِ يَتُوبُ اللَّهُ فَإِنْ وَاصِلٌ ظَلَمِهِ بَعْدَ مِنْ تَابَ فَمَنْ

Artinya: "Maka barang siapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 54:

عَلَى كَمْ رَبُّ كَتَبَ كَمْ عَٰلِي سَلَامٌ لَّ ۖ فُقُ بِآيَاتِنَا نَ ۖ يُؤْمِنُو الَّذِينَ جَاءَكَ وَإِذَا غَفُورٌ فَإِنَّهُ وَاصِلٌ بَعْدِهِ مِنْ تَابَ ۖ ثُمَّ بِجَهَالَةٍ سَوْءًا كَمْ ۖ لَمِنْ ۖ عَمِ مِنْ أَنَّهُ الرَّحْمَنُ ۖ تَقْبِيهِ

Artinya: “Apabila orang-orang yang beriman pada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah “Salaamu-alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas diriNya kasih sayang, (yaitu) bahwasannya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakan dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dari pengertian ayat-ayat diatas dapat dijelaskan bahwa bagi mereka yang melakukan kesalahan atau kejahatan dan selama itu mau memperbaiki dirinya dan bertaubat dengan sebenar-benarnya maka Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Selain itu juga tujuan daripada hukuman itu sendiri adalah tidak semata-mata sebagai balasan, akan tetapi juga berarti hukuman diharapkan sebagai pendorong bagi pelaku kejahatan untuk menjadi orang yang lebih baik serta melakukan taubat kepada Allah atas apa yang pernah dilakukan dengan sebenarbenarnya taubat dan tidak akan mengulangi apa yang pernah dilakukan.

Adapun dengan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik pidana peran masyarakat disekitarnya agar dapat menerima kembali untuk dapat melakukan aktifitas sebagai mana mestinya sebelum menjadi narapidana. Sedangkan tujuan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik pidana yakni memberikan motivasi dan dorongan serta memberi kesempatan pada mereka untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana serta mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemsarakatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dapat diambil suatu pengertian bahwa karena tujuan daripada hukuman ialah sebagaimana tujuan hukuman ta'zir dalam hukum Islam, yakni memberikan pendidikan dan pembinaan bagi narapidana agar tidak mengulangi tindakannya lagi. Bentuk daripada hukuman ta'zir itu jelas bertujuan untuk memacu para pelaku kejahatan agar bertaubat dan berbuat baik selama menjalani masa pidananya.

Maka dari itu pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik pidana dalam kaitannya dengan apa yang telah diterapkan dalam hukum Islam itu sendiri, karena pemberian pembebasan bersyarat dan tujuannya sama-sama memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak pidana untuk senantiasa berbuat baik dan jera agar tidak melakukan yang sama dan selalu mendorong narapidana dan anak pidana berbuat baik setelah menjalani pidananya, dilain sisi peran masyarakat di sekitarnya harus selalu aktif dalam mengarahkan dan tidak selalu mengucilkan bahwa mereka adalah mantan narapidana.

2.9 Kajian Terdahulu

1. Ninditasari (2007), Skripsi "Penelitian Implementasi Pembebasan bersyarat Dalam Proses Asimilasi Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surakarta". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembebasan bersyarat dalam proses asimilasi bagi narapidana dan upaya pemecahan terhadap hambatan yang dihadapi. Narapidana yang menjalani upaya pembinaan baik asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, harus sesuai dengan tahapan-tahapan proses pemasyarakatan yaitu tahap admisi atau orientasi, tahap pemberian bekal, dan tahap akhir pembinaan. Ada 2 macam bentuk kegiatan

asimilasi yaitu asimilasi intern dan asimilasi ekstern. Adapun faktor penghambat yang timbul dalam pelaksanaan asimilasi adalah (a) tidak semua masyarakat memahami sistem / proses pemasyarakatan, walaupun dalam pelaksanaannya sesuai prosedural tetapi kasus tersebut termasuk kasus yang menarik masyarakat, sehingga bisa menjadi hal kontroversi antara sistem pembinaan dan pemahaman masyarakat, tanggapan masyarakat yang negatif terhadap narapidana sebagai penjahat yang harus dikucilkan; (b) lembaga-lembaga sosial atau dinas-dinas pemerintahan belum pro aktif mempedulikan warga binaan pemasyarakatan, belum ada kerjasama yang baik, teratur, dan berkesinambungan atau kerjasama pembinaan dengan instansi terkait belum terprogram maksimal; (c) peranan petugas pemasyarakatan begitu besar sehingga tidak diimbangi dengan keprofesionalan petugas itu sendiri sehingga kurang pengawasan dalam pelaksanaan asimilasi, dan belum ada petugas pemasyarakatan yang mempunyai keahlian dan bertugas khusus terutama dalam pembinaan; (d) anggaran Rutan yang sangat minim sehingga pembinaan tidak berjalan maksimal dan kurang memadainya sarana dan fasilitas yang tersedia untuk pembinaan.

2. Penelitian Kuncoro (2006) Mengenai Pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM Republik Indonesia No M.01.Hn.02.01 Tahun 2001 Tentang Remisi Khusus Yang Tertunda Dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wirogunan Yogyakarta. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan studi kepustakaan yang didapat oleh penulis diperoleh hasil bahwa pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No 01.HN.02.01 Tahun 2001 dalam pemberian remisi khusus yang tertunda dan remisi khusus bersyarat dan remisi tambahan adalah suatu bentuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghargaan terhadap hak-hak para narapidana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Para petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta tidak mengalami hambatan ataupun kendala dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM Republik Indonesia No. M.01.HN.02.01 Tahun 2001 Tentang Remisi Khusus Yang Tertunda Dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan ketika pemberiannya. Alur pengusulan pemberian remisi khusus awalnya dari sub seksi registrasi lembaga pemasyarakatan dan berakhir di Kantor Wilayah Hukum dan HAM. Narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan remisi tidak hanya narapidana karena tahanan juga dapat diusulkan untuk mendapatkan remisi khusus tertunda. Efektifitas dari pemberian remisi itu sendiri terlihat dengan semakin terpacunya narapidana untuk mematuhi segala aturan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga tujuan dari proses pembinaan dari narapidana itu dapat tercapai. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemberian remisi pada hakekatnya dijabarkan pada Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. M.01.HN.02.01 Tahun 2001. Sedangkan implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai rujukan dalam pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.

3. Irwansyah (2009), dalam penelitiannya yang berjudul. Penyelenggaraan Bimbingan dan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Menjalani 17 Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) pada Balai Pemasyarakatan Metro. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan terhadap narapidana yang menjalani Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas pada Balai Pemasyarakatan Metro dilaksanakan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembimbing Kemasyarakatan untuk memenuhi hak narapidana agar mereka dapat diterima dalam proses integrasi ke dalam masyarakat. Bimbingan dan pengawasan kepada para narapidana meliputi kepribadian dan kemandirian. Bimbingan kepribadian dimaksudkan agar para narapidana memiliki kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara dan kesadaran hukum. Bimbingan kemandirian dimaksudkan agar setelah narapidana kembali ke dalam kehidupan masyarakat, mereka dapat bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga mereka diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum. Pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan merupakan rangkaian kegiatan pembinaan, bimbingan dan pengawasan yang menjadi wewenang Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan mempunyai peranan dalam membina narapidana yang pelaksanaan pidananya tidak berada di Lembaga Pemasyarakatan atau narapidana yang sedang menjalani proses integrasi baik dalam bentuk Pembebasan Bersyarat maupun Cuti Menjelang Bebas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Irwansyah adalah konteks komunikasi yang terjadi. Dalam penelitian ini secara jelas disebutkan pola komunikasi yang dipakai adalah pola komunikasi terbuka sedangkan 18 penelitian di atas menggunakan istilah pembinaan. Selain itu komunikan yang berkomunikasi juga berbeda. Dalam penelitian ini komunikannya adalah anak yang bermasalah dengan hukum, sedangkan komunikan dalam penelitian di atas narapidana secara umum atau bukan anak secara spesifik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana mengukur variabel. Defenisi operasional adalah penjelasan defenisi dari indikator variabel yang telah dipilih oleh peneliti yang merupakan petunjuk tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Berikut merupakan indikator efektivitas oleh Makmur (2011:7) antara lain:

- a. Ketepatan penentuan waktu. Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Ketepatan perhitungan biaya. Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat pada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada negara yang bersangkutan. Ketetapan dalam pemanfaatan biaya terhadap sesuatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Ketetapan dalam menetapkan suatu satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.
- c. Ketepatan dalam pengukuran. Adalah dengan ketetapan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.
- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan. Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjujur diantara yang jujur dan kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

- e. Ketepatan berpikir. Ketetapan berpikir akan melahirkan keefektivan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.
- f. Ketepatan dalam melakukan perintah. Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.
- g. Ketepatan dalam menentukan tujuan. Ketetapan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang telah ditetapkan dengan tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.
- h. Ketepatan sasaran. Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

2.11 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dan variabel tersebut. Adapun konsep operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Operasionalisasi Konsep

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas (PB) Pembebasan Bersyarat	Unsur-Unsur Pengukuran Efektivitas	1. Ketetapan penentuan waktu
		2. Ketetapan penghitungan biaya
		3. Ketetapan dalam pengukuran
		4. Ketetapan dalam menentukan pilihan
		5. Ketetapan berfikir
		6. Ketetapan dalam melakukan perintah
		7. Ketetapan dalam menentukan tujuan
		8. Ketetapan sasaran

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2017

2.12 Kerangka Berpikir

Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari eksplorasi teori yang dijadikan rujukan konseptual, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

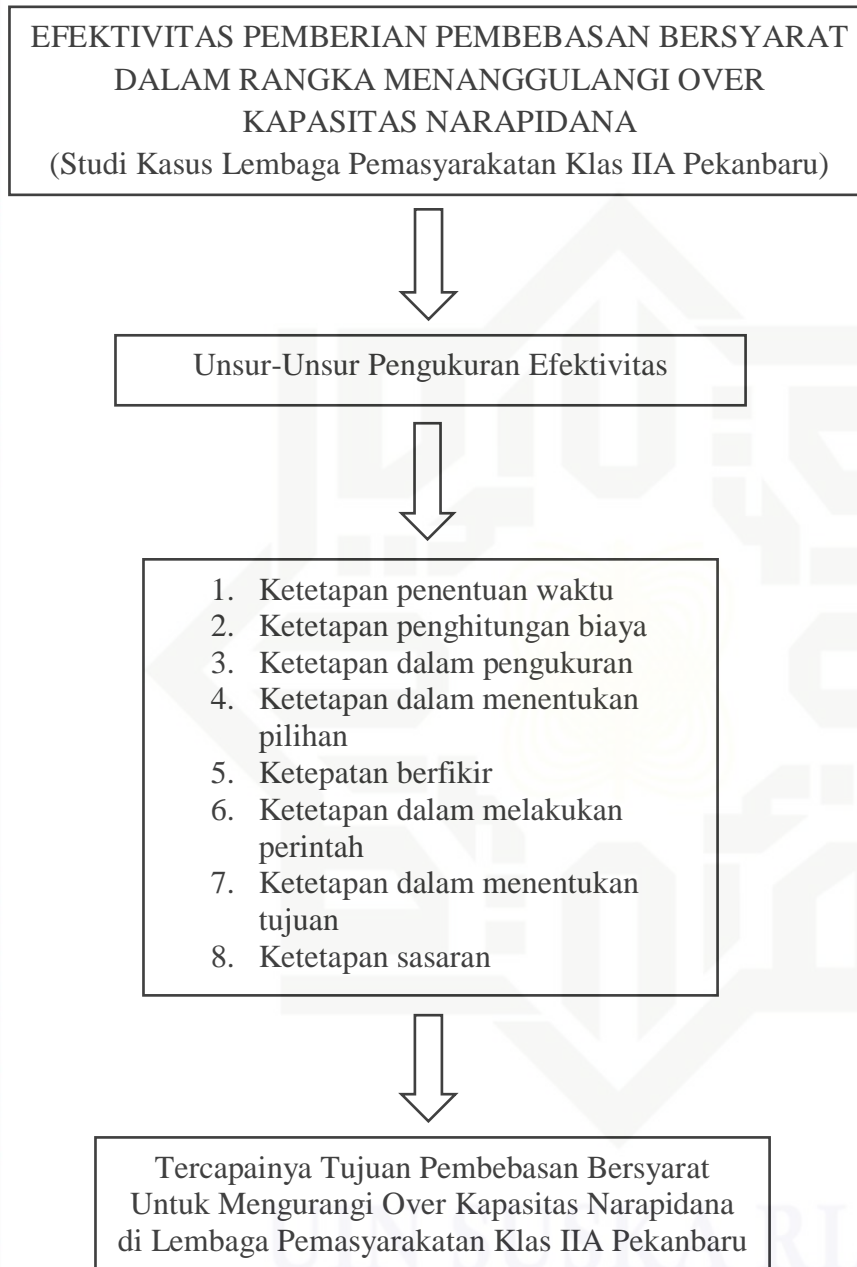
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2017